

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TA 2013

Denpasar, Selasa (10 Juni 2014) – Memenuhi ketentuan Undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, A.A. Gde Anom, dan Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta, **BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pengecualian atas kewajaran disebabkan oleh adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2013 diantaranya sebesar Rp3,84 miliar belum dilengkapi dengan informasi yang akurat dan jelas, belum dirinci sesuai jenis asetnya sehingga belum dapat ditelusuri keberadaannya dan belum dapat diyakini kewajaran nilainya.
2. Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2013 diantaranya sebesar Rp66,06 miliar merupakan aset jalan, irigasi dan jaringan yang belum mencantumkan informasi yang akurat dan jelas sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya.

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)
Telp : (0361) 229193, Fax : (0361) 229184, 256205
website : www.denpasar.bpk.go.id
e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com